

DAFTAR PUSTAKA

- Badryah, Mila. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan 1. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Bangun, Sabaruddin Yunis (2016). Peran Pendidikan Jasmani dan Olahraga pada Lembaga Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Publikasi Pendidikan* 6(3): 156-167.
- Desensi, Kelley, Blanton. and Beitel. 1990. Undergraduate And Graduate Sport Manajement Curricular Models: A Perspective *Journal Sport Management*.
- Effendy dan Onong Uchjana. 2007. Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- European Commission. (2014). "European Sports Charter". Diakses dari [European Sports Charter](#).
- Handoko dan Hani. 2012. Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE
- Harsuki. 2012. Pengantar Manajemen Olahraga. Jakarta: Rajawali Pers
- Haryanto, B (2019). Partisipasi Stakeholder dalam Tata Kelola Olahraga: Tinjauan Terhadap Keterlibatan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga* 10(3): 67-78.
- Koni Kota Semarang . (2023). Juara Umum Porprov Jateng 2023, Walikota Semarang : Pemkot Persiapkan Bonus Terbaik. [https://koni.semarangkota.go.id/blog/tag/porprov-2023/#:~:text=Ajang%20Pekan%20Olahraga%20Provinsi%20\(Porprov,Perak%20dan%20137%20Medali%20Perunggu](https://koni.semarangkota.go.id/blog/tag/porprov-2023/#:~:text=Ajang%20Pekan%20Olahraga%20Provinsi%20(Porprov,Perak%20dan%20137%20Medali%20Perunggu). Diakses pada 2 Desember 2024 pukul 15.28 wib
- Kusnadi, J (2022). Kepatuhan Terhadap Regulasi dalam Pengelolaan Olahraga di Indonesia. *Jurnal Sportif* 11(2): 89-101.
- Leo dan Agutino. 2008. Dasar-Dasar Keijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Mangkunegara, Anwar. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong dan Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nababan, Melfa Br., Rahma Dewi., Imran Akhmad (2018). Analisis Pla Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumatera Utara Tahun 2017. *Jurnal Pedagogik Olahraga* 4(1): 38-55.
- Prabowo, A (2020). Tata Kelola Keolahragaan di Indonesia: Tinjauan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Manajemen Olahraga* 12(2): 45-56.
- Prasetyo, Dian Estu., Damrah., Marjohan (2018). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga. *Gelanggang Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga* 1(2): 32-41.
- Setiyawan (2017). Visi Pendidikan Jasmani dan Olahraga. *JURNAL ILMIAH PENJAS (Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran)* 3(1): 74-86
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta

Sugiyono. 2012 Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: CV. Alfabeta
 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
 Suparyadi. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
 Utami, R (2021). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keolahragaan: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Ilmu Keolahragaan8(1): 22-34.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

A. Wawancara 1

Narasumber : Wahyoe Winarto
 Pihak : DPRD Kota Semarang
 Tanggal : 08 Mei 2023

1. Apa indikator DPRD membuat kebijakan mengenai keolahragaan?

Jawaban : “Indikator atau dasar dalam pembuatan Perda (Peraturan Daerah) atau Perwal (Peraturan Walikota) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu Revisi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nomor 3 Tahun 2005, karena dalam undang-undang tersebut, di ranah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota, wajib memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan olahraga.”

2. Apakah DPRD memiliki standart dalam membuat kebijakan keolahragaan?

Jawaban : “Dalam pembuatan Perda dan Perwal pasti melalui SOP (Standard Operational Prosedur), semua proses harus dilalui sebelum diterbitkannya Perda dan Perwal tersebut, jadi produk hukum yang dikeluarkan melalui proses yang panjang dan harus di evaluasi serta diketahui oleh pihak eksekutif (dinas terkait dan Walikota) dan pihak legislatif (anggota DPRD).”

3. Apa indikator bahwa kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan DPR?

Jawaban : “Penilaian terhadap suatu peraturan di daerah antara lain indikatornya; produk hukum telah tersampaikan kepada masyarakat, masyarakat merasakan dampak positif peraturan yg telah dibuat tersebut, adanya masukan dan saran yang membangun dari masyarakat terkait peraturan yang ada.”

4. Apakah dalam menyusun rancangan kebijakan, DPRD sebelumnya melakukan survei?

Jawaban : “Untuk penyusunan kebijakan atau peraturan, yang wajib dilakukan adalah memperhatikan kondisi masyarakat. Selain itu melihat dasar hukum di atasnya. Contoh misal Undang-Undang atau Peraturan Presiden atau Peraturan